

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PDRB
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2017**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Febi Tria Karina
No. Mahasiswa : 15313085
Pogram Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA**

2019

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PDRB
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2017**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk memenuhi Syarat Ujian Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Strata I
Jurusan Ilmu Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Febi Tria Karina
No. Mahasiswa : 15313085
Pogram Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Penulis,



Febi Tria Karina

PENGESAHAN

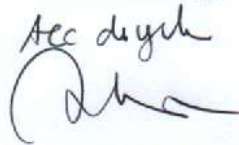
Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap PDRB di Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017

Nama : Febi Tria Karina
No. Mahasiswa : 15313085
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Sahabudin Sidiq, Dr., S.E., M.A.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PDRB DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2017**

Disusun Oleh : **FEBI TRIA KARINA**

Nomor Mahasiswa : **15313085**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 11 Maret 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA.

Penguji : Nur Feriyanto, Dr., M.Si



Mengetahui

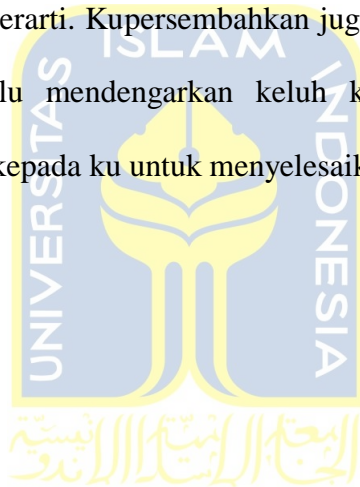
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada ALLAH SWT atas karunia dan rahmatNya skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku sebagai bentuk tanggung jawabku dan terimakasih telah memberikan kasih sayang, semangat, kesabaran, materiil dan doa tulus yang selalu kalian panjatkan untukku. Untuk seluruh Dosen Fakultas Ekonomi khususnya Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang berarti. Kupersembahkan juga karya ini kepada teman-teman seperjuangan yang selalu mendengarkan keluhan kesah, menemani, memberikan semangat dan dukungan kepada ku untuk menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia rahmat hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017” ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya didunia dan diakhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat dukungan, bantuan, motivasi, dan bimbingan. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya serta kesehatan yang telah dilimpahkanNya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
2. Kedua orangtua penulis yang telah memberikan dukungan, nasihat, kasih sayang dan do'a selama ini kepada penulis.
3. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq S.E., M.A selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Jaka Sriyana S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Teman-teman satu kosan dari semester awal sampai sekarang Hastin, Mita, Alvin, terima kasih atas kebersamaan suka dukanya selama ini.
6. Teman seperjuangan Syaquia, Agnisa, Khifatih, Rizka, Wendi, Vera, Lucky, Hervita, Gita, Tiwi. Terima kasih sumbangan saran, pemikiran serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman KKN Somongari, terima kasih untuk pengalaman dan kenangannya. Semoga sukses selalu dan kita dapat bertemu di lain waktu.
8. Teman-teman IE 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, kritik dan saran diperlukan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi segenap pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 15 Februari 2019

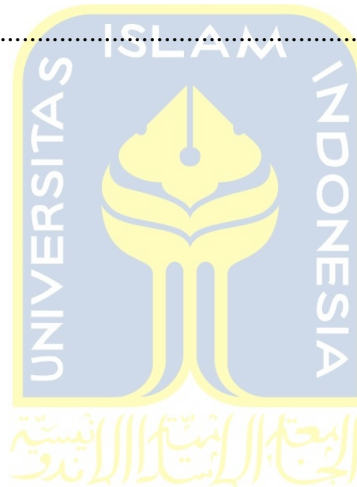
Penulis,

Febi Tria Karina

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Kajian Pustaka	8
2.2 Landasan Teori	15
2.3 Hubungan Antar Variabel	25
2.4 Hipotesis Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis dan Sumber Data	28
3.2 Definisi Operasional Variabel	29
3.3 Metode Analisis	30
3.4 Pemilihan Model Data Panel	34
3.5 Pengujian Statistik	35

BAB IV HASIL DAN ANALISIS	38
4.1 Deskriptif Data	38
4.2 Hasil Uji Data Panel	40
4.3 Pengujian Kesesuaian Model	43
4.4 Model Regresi Panel <i>Fixed Effect</i>	45
4.5 Analisis Hasil dan Pembahasan Ekonomi.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Implikasi	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	62



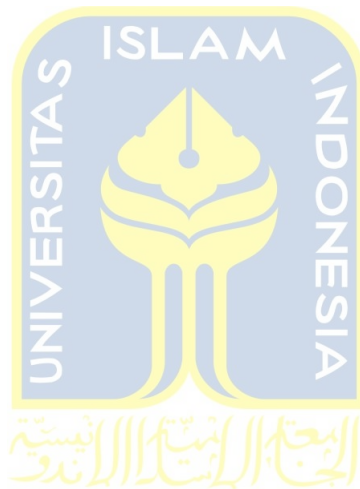
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PDRB di Jawa Tengah 2015-2017	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 4.1 Hasil Estimasi Common Effect.....	40
Tabel 4.2 Hasil Estimasi Fixed Effect.....	41
Tabel 4.3 Hasil Estimasi Random Effect	42
Tabel 4.4 Hasil Uji Chow.....	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Fixed Effect	45
Tabel 4.7 Estimasi Pengujian Hipotesis.....	47
Tabel 4.8 Analisis Intercept.....	49



DAFTAR GRAFIK

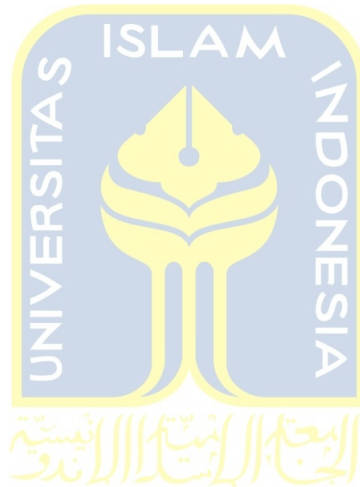
Gambar 4.1 PDRB Kab/Kota DI Jawa Tengah 39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- I. Data Variabel Dependen dan Independen
- II. Hasil *Common Effect*
- III. Hasil *Fixed Effect*
- IV. Hasil *Random Effect*
- V. Hasil Uji Chow
- VI. Hasil Uji Hausman



ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2013-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang di estimasi dengan regresi data panel menggunakan metode *fixed effect* sebagai metode terbaik yang menghasilkan gambaran bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif, Belanja Daerah berpengaruh signifikan dan positif, serta Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci : Desentralisasi Fiskal, PAD, DAK, DBH, Belanja Daerah, PDRB, *Fixed Effect*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan otonomi daerah. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturann perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Otonomi daerah dapat dilaksanakan jika adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah yang disebut juga dengan desentralisasi.

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, otonomi daerah dan desntralisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Otonomi daerah dan desentralisasi tentunya memiliki perbedaan. Otonomi daerah memberikan kebebasan pada daerah dalam melaksanakan dan menjalankan tugas atau kewajibannya. Sedangkan desentralisasi adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam pendistribusian anggaran guna meningkatkan pelayanan publik. Sehingga daerah yang menerima kewenangan harus dapat menentukan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam

pendistribusian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah harus disertai dengan distribusi keuangan atau pembiayaan yang memadai. Konsep otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia dalam menjalankan kewenangan dan mengurus sendiri daerahnya perlu adanya keputusan politik dalam menjalankannya guna meningkatkan pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan.

Tabel 1.1.
Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2017 (Rupiah)

Tahun	PDRB
2013	726 655 118,06
2014	764 959 150,95
2015	806 765 092,17
2016	849 313 199,72
2017	894 050 472,53

Sumber: BPS Jawa Tengah 2013-2017

Pada tabel diatas menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah dari tahun 2013-2017 semakin meningkat. Hal ini terjadi karena perekonomian di Jawa Tengah didorong oleh pembangunan infrastuktur yang dapat menggerakkan sektor-sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan infrastruktur tentu saja tidak lepas oleh adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan pendidikan agar tidak tertinggal oleh daerah lain sehingga meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah.

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya dibiayai oleh APBN, namun dapat bersumber dari pendapatan yang digali dari potensi daerah. Maka dari itu, APBD memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi. Sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD), dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jenis penerimaan ini masuk ke dalam APBD provinsi, kabupaten dan kota.

Suatu perekonomian memerlukan pengukuran dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah. PAD adalah suatu pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah. Daerah dengan PAD yang dapat meningkat setiap tahun mengindikasikan bahwa daerah tersebut mandiri dalam membangun daerahnya tanpa ketergantungan dana dari pusat. Jika peningkatan PAD menyebabkan perekonomian

semakin buruk maka peningkatan PAD belum dapat dikatakan sebagai keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Saragih, 2003).

Dana perimbangan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam desentralisasi. Dana perimbangan adalah pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan. DAU dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pendanaan kebutuhan daerah. Tujuan dari DAU yaitu untuk mendukung sumber penerimaan daerah dan mendistribusikan keuangan pemerintah daerah secara merata (Saragih, 2003). DAK adalah pendanaan dari pemerintah pusat yang dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah untuk menjadi program prioritas nasional. Menurut (Kusuma, 2016) semakin kecil DAK mengartikan bahwa pemerintah daerah mampu melaksanakan program prioritas nasional.

Belanja daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Soeradi, 2014). Menurut Kusuma (2016) belanja pemerintah yang daerah efektif merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengalokasikan sumber daya yang tepat diharapkan pendapatan daerah juga meningkat.

Penulis tertarik untuk mengetahui hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi pada tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dengan melakukan penelitian ini penulis ingin mengetahui pengaruh dari desentralisasi fiskal

mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Maka dari itu, penyusun mengajukan judul penelitian sebagai berikut “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten dan kota di Povinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah.

2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

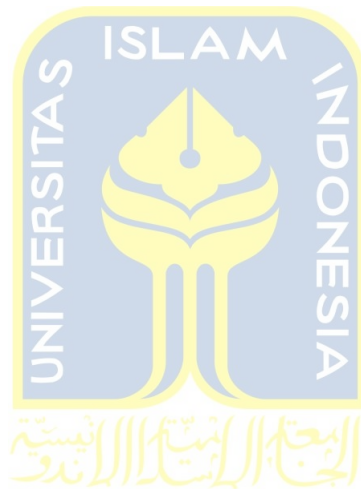
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan dapat memberikan referensi dalam pembangunan ekonomi dan pertumbuhan daerah.
2. Bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan pengalokasian keuangan dan sumber daya agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, terdapat lima bab diantaranya Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Pada Bab II membahas mengenai kajian pustaka, landasan teori, dan hipotesis penelitian. Kajian pustaka berisi perbandingan dengan penelitian terdahulu yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai teori yang ada dalam landasan teori. Bagian terakhir merupakan hipotesis penelitian yang menggambarkan dugaan sementara yang berkaitan dengan penelitian. Dalam Bab III metode penelitian

menjelaskan tentang jenis data dan sumber data penelitian yang terdiri dari operasional variabel yang menjelaskan variabel dalam penelitian. Pada Bab VI hasil dan pembahasan mendeskripsikan data penelitian serta melakukan analisis data yang selanjutnya dapat interpretasi. Pada Bab V memuat simpulan dan implikasi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab ini akan memuat dan mengkaji dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang kemudian mendasari pemikiran penulis serta menjadikan pertimbangan sehingga menjadikan topik ini sebagai topik yang menarik terhadap pembahasan sebagai bahan dan panduan dalam penyusunan skripsi ini.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

Judul	Metode Penelitian	Hasil
Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (Bambang dan Mahmudi, 2012)	Uji Structural Equation Model (SEM)	Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi desentralisasi fiskal maka pertumbuhan ekonomi menurun. Sedangkan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, semakin tinggi desentralisasi fiskal maka kesejahteraan masyarakat meningkat.
Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era	Uji data panel dengan metode Generalized Least Square (GLS)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD, DBH, tenaga

Desentralisasi Fiskal (Pujiati, 2007)		kerja menunjukkan hasil positif atau signifikan. Sedangkan DAU menunjukkan negatif atau tidak signifikan.
Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali (Adi, 2005)	Uji ANOVA	Pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selama desentralisasi fiskal lebih baik daripada sebelum desentralisasi fiskal.
Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Hadi, 2005)	Analisis regresi dengan variabel yang dibakukan (standardise regression) dengan menggunakan SPSS	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tenaga kerja signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY. PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi hanya di Sleman dan Yogyakarta. DAU signifikan dan berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi di Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan Yogyakarta. Sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi DIY.
Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah	Panel Least Square (PLS)	Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara

(Lintantia dan Miyasto, 2013)		pertumbuhan ekonomi dengan tenaga kerja. Sedangkan variabel jumlah penduduk dan pajak daerah memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi.
Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional di Indonesia (Kanetasya dan Jaya, 2014)	Panel Ordinary Least Square	Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui sisi penerimaan APBD dan tenaga kerja. Sedangkan di sisi perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu (Zulyanto, 2010)	Uji asumsi klasik (autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinieritas)	Investasi, human capital, dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara (Situngkir, dkk, 2014)	Analisis regresi berganda dengan metode estimasi fixed effect	Investasi, rata-rata lama sekolah, level awal pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan desentralisasi fiskal dengan indikator pengeluaran dan indikator pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh (Anita, Mohammad, Hamzah, 2014)	Ordinary Least Square (OLS)	Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa DBH, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo (Supriyadi, Armandelis, Rahmadi, 2013)	Uji korelasi sederhana Pearson (Product Moment Coefficient of Correlation) dan uji derajat desentralisasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Sedangkan DBH dan sumbangan atau bantuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.
--	---	---

Bambang Saputra dan Mahmudi (2012), dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”. Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi desentralisasi fiskal maka pertumbuhan ekonomi menurun. Sedangkan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, semakin tinggi desentralisasi fiskal maka kesejahteraan masyarakat meningkat. Penelitian ini menggunakan uji Structural Equation Model (SEM) dengan dua variable endogen yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Amin Pujiati (2007), dengan judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal”. Temuan ini tidak mendukung teori pertumbuhan neoklasik, pembangunan daerah belum optimal dalam mengelola keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa variable PAD, DBH, tenaga kerja menunjukkan hasil positif atau signifikan. Sedangkan DAU menunjukkan negatif atau tidak signifikan. Penelitian ini menggunakan variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), PAD

(Pendapatan Asli Daerah), DBH (Dana Bagi Hasil), DAU (Dana Alokasi Umum), dan Tenaga Kerja. Data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan time series dan cross section. Data time series tahun 2002-2006 dengan menggunakan obyek 6 kabupaten/kota di wilayah karesidenan Semarang. Hasilnya menunjukkan bahwa variable PAD, DBH, tenaga kerja menunjukkan hasil positif atau signifikan. Sedangkan DAU menunjukkan negatif atau tidak signifikan.

Priyo Hari Adi (2005), dengan judul “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali”. Pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selama desentralisasi fiskal lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi sebelum desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan data sebelum desentralisasi dan sesudah desentralisasi.

Sasana Hadi (2005), dengan judul “Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Analisis yang digunakan adalah Pooled Least Square (PLS) dengan rentan waktu 2001-2003 di lima kabupaten/kota. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tenaga kerja signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY. PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi hanya di Sleman dan Yogyakarta. DAU signifikan dan berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi di

Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan Yogyakarta. Sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi DIY.

Lintantia Fajar Apriesa dan Miyasto (2013), dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah”. Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan tenaga kerja. Sedangkan variabel jumlah penduduk dan pajak daerah memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi.

Kanetasya Salsabilla dan Wihana Kirana Jaya (2014), dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional di Indonesia”. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui sisi penerimaan APBD dan tenaga kerja. Sedangkan di sisi perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup luas yaitu negara Indonesia dengan menggunakan sisi perdagangan internasional yaitu variabel ekspor dan impor.

Aan Zulyanto (2010), dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu”. Desentralisasi dengan bentuk Hump Shaped yang berarti bahwa jika derajat desentralisasi belum

tinggi maka berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, jika derajat desentralisasi fiskal tinggi maka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan yaitu variabel level awal pertumbuhan dan dua variabel kontrol yaitu investasi dan human capital.

Ferddy Situngkir, Sirojuzilam, Erlina, Agus Suriadi (2014), dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara”. Desentralisasi fiskal menggunakan pendekatan otonomi, pendekatan penerimaan, dan pendekatan pengeluaran. Pendapatan pemerintah daerah masih didominasi dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara masih bergantung dengan pemerintah pusat dalam pembangunan.

Anita, Said Mohammad, Abubakar Hamzah (2014), dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh”. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel DBH, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sesudah desentralisasi lebih baik dibandingkan sebelum adanya desentralisasi sehingga kebijakan desentralisasi dianggap penting dalam kemajuan ekonomi daerah.

Supriyadi, Armandelis, dan Selamat Rahmadi (2013), dengan judul “Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo”. Penelitian ini menggunakan analisis derajat desentralisasi fiskal dan korelasi sederhana

pearson (product moment coefficient of correlation). Dalam penelitian juga menjelaskan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dianalisis dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan transfer. Sedangkan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dianalisis dengan membandingkan pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah.

2.2 Landasan Teori

Bab ini menjelaskan terkait desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, teori desentralisasi fiskal, teori pertumbuhan ekonomi, sumber pembiayaan daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja pemerintah.

2.2.1 Desentralisasi fiskal dan Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya sesuai dengan perundang-undangan. UU Nomor 32 tahun 2004 mendefinisikan bahwa daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Saragih (2003), desentralisasi adalah berkurangnya atau diserahkannya sebagian atau seluruh wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah. Sehingga daerah yang menerima wewenang yang bersifat otonom dapat menentukan caranya

sendiri berdasarkan prakarsa sendiri secara bebas untuk stabilitas ekonomi daerah itu sendiri.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia memiliki prinsip dan tujuan diantaranya (Mardiasmo, 2009);

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (vertical fiscal imbalance) dan antar daerah (horizontal fiscal imbalance).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi sumber daya nasional.
4. Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Penerapan otonomi daerah bertujuan mengembangkan seluruh potensi ekonomi maupun sumber daya suatu daerah agar dapat mamacu aktivitas perekonomian yang ada di daerah sehingga adapat meningkatkan perekonomian nasional. Otonomi daerah memiliki tiga prinsip dalam implementasi. Pertama desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (kabupaten/kota) sehingga otonomi dititikberatkan pada daerah tersebut. Kedua dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada

gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. Ketiga tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau desa dan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota serta dari kabupaten/kota ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2.2.2 Teori Desentralisasi Fiskal

UU Nomor 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa desentralisasi yaitu sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan agar pemerintah daerah fokus akan permasalahan dan potensi sumber daya yang ada di daerahnya sehingga dapat mengembangkan potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Terdapat empat tugas desentralisasi yang diberikan pemerintah pusat ke daerah, yaitu:

1. Desentralisasi politik merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan termasuk penetapan standard dan berbagai tingkat pemerintahan, seperti pemilihan pilkada langsung.

2. Desentralisasi administrasi merupakan wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan.
3. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah untuk menggali sumber pendapatan, hak menerima transfer daerah dari pusat, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.
4. Desentralisasi ekonomi bertujuan untuk menggali potensi sumber daya yang ada di suatu daerah agar pemerintah daerah dapat dengan mudah mengelola SDA yang dimilikinya agar pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat meningkat.

2.2.3 Sumber Pendapatan Daerah

Agar pelimpahan wewenang desentralisasi berjalan baik maka pemerintah juga memberikan kewenangan sumber-sumber pendapatan daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH)
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 3. Pinjaman daerah (pusat, daerah lain, perbankan)
- 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dan penerimaan daerah yang sah
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana dan membiayai kegiatan rutin pembangunan. Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan PAD di daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak menghambat kegiatan ekonomi di daerahnya. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 3 ayat 1)

Menurut UU Nomor 25 tahun 1999 sumber penerimaan daerah:

- a. Hasil pajak daerah

- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2.2.5 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan pusat ke daerah menjelaskan dana perimbangan dialokasikan untuk Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan non pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan perimbangan merupakan salah satu kebijakan otonomi daerah dalam penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat ke daerah. Semakin banyak pelimpahan wewenang maka semakin besar pula biaya yang dibutuhkan oleh daerah (Situngkir., dkk 2014). Menurut Sabilla dan Jaya (2014) anggaran penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan dan PAD merupakan kewenangan daerah dalam mengalokasikan dananya untuk kesejahteraan masyarakat daerah yang dikur dari pertumbuhan per kapita setiap provinsi.

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil sesuai persentase tertentu (Safrianto, 2016). Dana bagi hasil meliputi penerimaan pajak dan penerimaan sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dana bagi hasil pada APBN yang dialokasikan berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari suatu daerah berupa sumber-sumber daya nasional yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

- a. kehutanan
- b. pertambangan umum

- c. perikanan
- d. pertambangan minyak bumi
- e. pertambangan gas bumi
- f. pertambangan panas bumi

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah pengalokasian dana yang bersumber dari APBN ke daerah guna membantu mendanai kegiatan khusus urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Pasal 40 Tahun 2004 pemerintah menetapkan kriteria DAK meliputi:

- a. Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD.
- b. Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.
- c. Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

2.2.6 Belanja Daerah

Belanja daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Soeradi, 2014). Dengan mengalokasikan belanja daerah dengan tepat maka pendapatan daerah meningkat. Salah satu peran pemerintah daerah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dengan cara mengefektifkan belanja daerah (Kusuma, 2016).

Menurut Soeradi (2014) belanja daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Bunga
 - c. Belanja Subsidi
 - d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
 - e. Belanja Bagi Hasil
 - f. Belanja Bantuan Keuangan
 - g. Belanja Tidak Terduga
2. Belanja Langsung
 - a. Alokasi Belanja Langsung

- b. Belanja Pegawai
- c. Belanja Barang dan Jasa
- d. Belanja Modal

2.2.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Suatu kondisi ekonomi di negara atau wilayah dalam satu periode tertentu dapat diketahui melalui indikator Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga yang berlaku atau harga konstan (Situngkir dkk., 2014). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian dalam suatu daerah atau wilayah pada periode tertentu. Salah satu sasaran dalam pembangunan daerah dengan cara meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan PDRB atas harga konstan yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Laju pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan PDRB per kapita tidak memandang tidak memandang kenaikan lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, maupun perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak (Apriesa, 2013).

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB

PAD dapat dilihat dari besar kecilnya nilai investasi suatu daerah, nilai investasi yang tinggi setiap tahun dengan kegiatan ekonomi yang meningkat maka dapat berdampak pada PDRB yang cukup besar (Saragih, 2003). PAD yang berasal dari sisi penerimaan dan merupakan salah satu wujud desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu provinsi (Sabilla & Jaya, 2014). Suatu daerah yang memiliki potensi sumber daya yang bagus baik sumber daya alam yang besar maupun sumber daya manusia yang berkualitas cenderung dapat meningkatkan PAD sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan sebagai modal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah, seperti pembelian mesin yang nantinya dapat meningkatkan output sehingga PDRB meningkat.

2.3.2 Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap PDRB

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong pembangunan daerah. Pelayanan dasar masyarakat meliputi pendidikan, infrastruktur dan prasarana. Melalui kualitas pendidikan yang

baik maka mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terutama dalam mutu tenaga kerja yang produktif sehingga mampu meningkatkan daya guna faktor produksi seperti memanfaatkan modal dan mengolah tanah sehingga PDRB akan ikut meningkat.

2.3.3 Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap PDRB

Semakin besar dana bagi hasil yang didapatkan suatu daerah maka telah terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di daerah sehingga PDRB juga akan meningkat. Daerah yang memiliki kekayaan SDA seperti kehutanan, migas, pertambangan, dan perikanan akan mendapatkan porsi yang besar pada DBH yang bersumber dari penerimaan SDA tersebut daripada daerah lain yang bukan daerah penghasil. Dengan demikian, dana transfer tersebut digunakan untuk mengembangkan industri dalam menghasilkan produksi. Suatu daerah yang dapat menggali potensi-potensi sumber daya yang ada di daerahnya maka akan meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga PDRB di daerah tersebut juga ikut meningkat.

2.3.4 Belanja Daerah terhadap PDRB

Belanja daerah yang dialokasikan dengan tepat dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Misalnya dalam belanja modal yang digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya dapat menyerap tenaga kerja bagi penduduk di daerah tersebut akibat efisiensi beberapa

perusahaan. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat meningkat dan berpengaruh terhadap peningkatan output sehingga PDRB mengalami peningkatan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Hipotesis dimaksudkan dapat memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan penulis, yang selanjutnya diuji kebenarannya dengan menggunakan data yang telah ada.

Berikut hipotesis penelitian yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
3. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
4. Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data panel di 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) Kemenkeu. Data yang peneliti pakai terdiri dari:

1. Data PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017
2. Data Dana Perimbangan (DAK, DBH) Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017
3. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017
4. Data Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang berguna untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang membahas bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Dependen

3.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan ekonomi kenaikan output perkapita yang berkelanjutan melalui pendapatan nasional. Penelitian ini dalam mengukur pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB atas harga konstan 2010. PDRB atas harga konstan yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

3.2.2 Variabel Independen

3.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dari kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana dan membiayai kegiatan rutin pembangunan. Dalam penelitian ini pendapatan asli daerah menggunakan satuan yaitu ribu rupiah.

3.2.2.2 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang bertujuan dalam mendanai kegiatan

khusus berupa urusan daerah dengan prioritas nasional. Dalam penelitian ini pendana alokasi khusus menggunakan satuan yaitu ribu rupiah.

3.2.2.3 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil sesuai persentase tertentu. Dana bagi hasil dapat diperoleh dari pajak dan sumber daya alam. Dalam penelitian ini dana bagi hasil menggunakan satuan yaitu ribu rupiah.

3.2.2.4 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah dalam satu periode yang menggunakan pendapatan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Belanja daerah berasal dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam penelitian ini belanja daerah menggunakan satuan yaitu ribu rupiah.

3.3 Metode Analisis

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data sekunder dan mengolah data. Penelitian ini menggunakan data panel. Menurut Widarjono (2009) data panel adalah gabungan antara dua data yaitu data time series (runtutan waktu) dan cross

section (individu). Data cross section adalah data yang terdiri dari jumlah observasi pada suatu titik tertentu. Sedangkan data time series adalah data suatu individu dalam rentang waktu tertentu. Persamaan regresi sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD + \beta_2 DAK + \beta_3 DBH + \beta_4 BD + U_{it}$$

Keterangan dan deskripsi variabel:

PDRB_{it} = variabel produk domestic regional bruto atas dasar harga konstan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017.

PAD = variabel pendapatan asli daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017.

DAK = variabel dana alokasi umum antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017.

DBH = variabel dana alokasi khusus antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017.

BD = variabel belanja daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017.

Dalam penelitian menggunakan data panel terdapat beberapa keuntungan yaitu mampu menyuguhkan data dalam jumlah yang banyak

sehingga menghasilkan *degree of freedom* dan mampu menatasi masalah yang muncul seperti ketika adanya masalah penghilangan variabel (*omitted variabel*).

Regresi data panel memiliki tiga metode dalam mengestimasi yang terdiri dari *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Ketiga model tersebut dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1 Common Effect Models (CEM)

Data yang mengkombinasikan data time series dan cross section tanpa memperhatikan perbedaan antar individu dan waktu dapat menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dalam mengestimasi. Diasumsikan bahwa individu sama dalam berbagai kurun waktu. Persamaan model regresi CEM ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it}$$

3.3.2 Fixed Effect Models (FEM)

Model fixed effect berdasarkan pada perbedaan intersep antar individu namun intersep antar waktu sama. Model ini diasumsikan slope tetap antar individu dan antar waktu. Untuk menjelaskan perbedaan intersep dapat menggunakan metode teknik variabel dummy. Model estimasi ini disebut

Least Squares Dummy Variables (LSDV). Formulasi model FEM dengan teknik variabel dummy ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1i} + \beta_4 D_{4i} + \beta_5 D_{5i} + e_{it}$$

3.3.3 Random Effect Models (REM)

Model ini mengestimasi data panel menggunakan variabel gangguan (*error terms*) dimana variabel ini saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Persamaan metode REM ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it} \quad (1.1)$$

Dalam hal ini β_{0i} bersifat random dan tidak lagi tetap (nonstokastik) sehingga diekspresikan kedalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$\beta_{0i} = \beta_0 + \mu_i \text{ dimana } i = 1, \dots, n \quad (1.2)$$

substitusi persamaan (1.1) ke persamaan (1.2) menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Y_{it} &= (\beta_0 + \mu_i) + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \\ &= \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + (e_{it} + \mu_i) \\ &= \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + V_{it} \quad (1.3) \end{aligned}$$

dimana $V_{it} = e_{it} + \mu_i$

persamaan (1.3) merupakan metode random effect. Nama metode random effect berasal dari variabel gangguan (V_{it}) terdiri dari dua komponen, yaitu variabel gangguan secara menyeluruh (e_{it}) yaitu gabungan antara time series dan cross section dan variabel gangguan secara individu (μ_i).

3.4 Pemilihan Model Data Panel

Pemilihan model dalam data panel bertujuan untuk menentukan model yang terbaik. Beberapa metode yang digunakan adalah:

1. Uji Chow Test adalah pengujian yang digunakan untuk memilih *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*.

Dalam pengujian ini menggunakan hipotesis berikut:

H_0 : Model *Pooled Least Square*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Apabila nilai F-stat pada uji chow lebih besar dari F tabel maka menolak hipotesis nol sehingga model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*, dan sebaliknya.

2. Uji Hausman adalah pengujian yang digunakan untuk memilih *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*.

Dalam pengujian ini menggunakan hipotesis berikut:

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Jika nilai statistik hausman lebih besar dari nilai kritis maka menolak hipotesis nol sehingga pemilihan model yang tepat adalah *Fixed Effect Model* dan sebaliknya jika nilai statistik hausman lebih kecil dari nilai kritis maka model yang digunakan adalah *Random Effect Model*.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah pengujian yang digunakan untuk memilih *Common Effect Model* atau *Random Effect Model*.

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Common Effect*

Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi-squares maka menolak hipotesis nol sehingga pemilihan model yang tepat adalah *Random Effect Model* dan sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai kritis statistik chi-squares maka model yang digunakan adalah *Common Effect Model*.

3.5 Pengujian Statistik

3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa baik kesesuaian garis regresi dengan datanya atau mengukur persentase total seluruh variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 sampai 1. Jika angkanya semakin mendekati 1 maka garis regresi semakin

baik karena mampu menjelaskan datanya, sebaliknya jika mendekati 0 maka garis regresi kurang baik. (Widarjono, 2009)

3.5.2 Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji signifikansi F diambil berdasarkan perbandingan antara nilai probabilitas dengan taraf derajat signifikansi 5 persen. Hipotesis uji signifikansi F sebagai berikut:

- a. Nilai $\text{Prob.F} > \alpha$ (5 persen), yang berarti tidak signifikan maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Nilai $\text{Prob.F} < \alpha$ (5 persen), yang berarti signifikan maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3 Uji T

Uji T bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen secara individu apakah signifikan atau tidak signifikan. Pengaruh individu dapat berupa pengaruh positif atau pengaruh negatif terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji signifikansi t didasarkan perbandingan antara

nilai signifikansi (*p-value*) dengan taraf derajat signifikansi 1 persen, 5 persen, dan 10 persen. Hipotesis uji signifikansi t sebagai berikut:

- a. Nilai $p\text{-value} > \alpha$ (1 persen, 5 persen, atau 10 persen), yang berarti tidak signifikan atau gagal menolak H_0 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Nilai $p\text{-value} < \alpha$ (1 persen, 5 persen, atau 10 persen), yang berarti signifikan atau menolak H_0 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Asumsi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen:

- a. Apabila nilai koefisien variabel independen memiliki angka positif maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara positif.
- b. Apabila nilai koefisien variabel independen memiliki angka negatif maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara negatif.

BAB IV

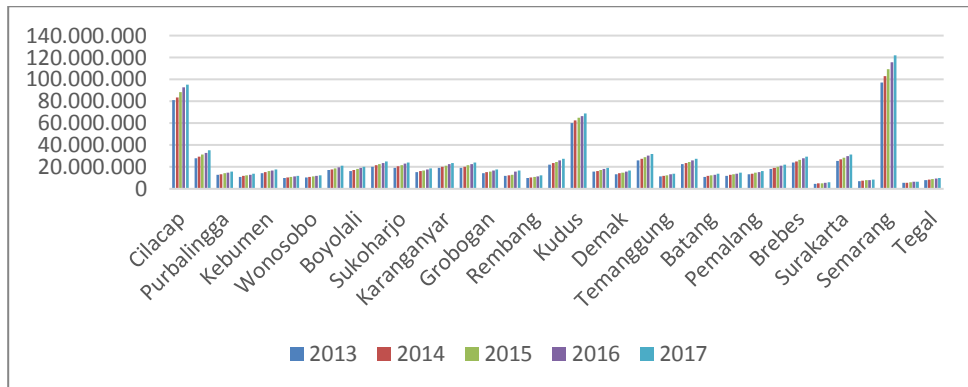
HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data Pendapatan Asli Daerah (PAD), (Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Non Pajak, dan Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan menggunakan data runtut waktu (time series) selama 5 tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dan lintas unit (cross section) 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel yang diolah dengan *Eviews 9*. Analisis dari hasil regresi ini menjelaskan tentang model regresi dan hasil ujinya yang bertujuan untuk memperoleh model terbaik sehingga dapat menjelaskan beberapa permasalahan yang nantinya akan dijawab dan sesuai dari tujuan penelitian. Gambar 4.1 menunjukkan PDRB Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan sebagai berikut :

Gambar 4.1

Grafik PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Dari hasil grafik diatas menunjukkan bahwa PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah setiap tahun mengalami peningkatan. Beberapa wilayah yang memiliki PDRB tertinggi yaitu Kota Semarang, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kudus. Dari tahun ke tahun Kota Semarang menjadi memiliki PDRB tertinggi diantara 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun terakhir 2017, nilai PDRB Kota Semarang sebesar Rp 122.000.440 juta, kedua di daerah Kabupaten Cilacap dengan nilai PDRB sebesar Rp 95.103.847 juta, dan yang ketiga daerah Kabupaten Kudus dengan nilai PDRB sebesar 68.649.054 juta. Selain itu, daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kota Salatiga, Kota Pekalongan, dan Kota Magelang. Nilai PDRB dalam tahun terakhir yaitu 2017 Kota Salatiga memiliki nilai PDRB sebesar Rp 8.589.010 juta, yang kedua Kota Pekalongan

dengan nilai PDRB sebesar Rp 6.706.279 juta, dan yang ketiga Kota Magelang dengan nilai PDRB sebesar Rp 5.804.312 juta.

4.2 Hasil Uji Data Panel

Regrsi data panel dilakukan dengan pendekatan tiga metode yaitu Common Effect Models (CEM), Fixed Effect Models (FEM), dan Random Effect Models (REM). Berikut hasil pengolahan dan pemilihan model yang diterapkan.



Tabel 4.1

Hasil Estimasi Common Effect Model

Dependent Variable: LOGPDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/08/18 Time: 22:49
 Sample: 2013 2017
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-13.17860	3.234250	-4.074702	0.0001
LOGPAD	0.112117	0.118882	0.943098	0.3470
LOGDAK	-0.019506	0.062275	-0.313229	0.7545
LOGDBH_PAJAK_NON_PAJAK	0.540321	0.093379	5.786303	0.0000
LOGBELANJA_DAERAH	0.503785	0.185315	2.718537	0.0072
R-squared	0.374770	Mean dependent var	16.67083	
Adjusted R-squared	0.360059	S.D. dependent var	0.671548	
S.E. of regression	0.537214	Akaike info criterion	1.623314	
Sum squared resid	49.06175	Schwarz criterion	1.713736	
Log likelihood	-137.0399	Hannan-Quinn criter.	1.659992	
F-statistic	25.47498	Durbin-Watson stat	0.067907	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil pengolahan dari Eviews 9

Tabel 4.2

Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOGPDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/08/18 Time: 22:50
 Sample: 2013 2017
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.97085	0.675647	17.71760	0.0000
LOGPAD	0.082280	0.015464	5.320618	0.0000
LOGDAK	0.048719	0.005873	8.295566	0.0000
LOGDBH_PAJAK_NON_PAJAK	-0.024635	0.016439	-1.498554	0.1363
LOGBELANJA_DAERAH	0.067766	0.025432	2.664617	0.0086
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.998410	Mean dependent var		16.67083
Adjusted R-squared	0.997965	S.D. dependent var		0.671548
S.E. of regression	0.030291	Akaike info criterion		-3.962361
Sum squared resid	0.124785	Schwarz criterion		-3.257066
Log likelihood	385.7066	Hannan-Quinn criter.		-3.676273
F-statistic	2247.018	Durbin-Watson stat		1.820572
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil pengolahan dari Eviews 9

Tabel 4.3

Hasil Estimasi Random Effect Model

Dependent Variable: LOGPDRB
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 12/08/18 Time: 22:52
 Sample: 2013 2017
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 175
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.68452	0.677759	17.23993	0.0000
LOGPAD	0.083301	0.015433	5.397555	0.0000
LOGDAK	0.046870	0.005853	8.007230	0.0000
LOGDBH_PAJAK_NON_PAJAK	-0.018097	0.016358	-1.106270	0.2702
LOGBELANJA_DAERAH	0.072971	0.025370	2.876259	0.0045
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.516458	0.9966
Idiosyncratic random			0.030291	0.0034
Weighted Statistics				
R-squared	0.835545	Mean dependent var		0.437118
Adjusted R-squared	0.831675	S.D. dependent var		0.077943
S.E. of regression	0.031978	Sum squared resid		0.173842
F-statistic	215.9288	Durbin-Watson stat		1.298140
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.092352	Mean dependent var		16.67083
Sum squared resid	71.22308	Durbin-Watson stat		0.003169

Sumber : Hasil pengolahan dari Eviews 9

4.3 Pengujian Kesesuaian Model

4.3.1 Uji Chow

Model ini digunakan untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model dengan Common Effect Model. Hasil *Uji Chow* ditampilkan dalam tabel 4.4 :

Tabel 4.4

Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1568.686780	(34,136)	0.0000
Cross-section Chi-square	1045.493120	34	0.0000

Sumber : Hasil pengolahan dari Eviews 9

Berdasarkan hasil *uji chow* diatas menunjukkan bahwa nilai statistic chi-squarenya sebesar 1045.493120 dengan nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$ (α 5%) yang artinya menolak H_0 dan menerima H_a . Kesimpulan dari *uji chow* menunjukkan bahwa *Fixed Effect Models* lebih baik dibandingkan dengan *Common Effect Models*.

4.3.2 Uji Hausman

Model ini digunakan untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model dengan Random Effect Model. Hasil *Uji Hausman* ditampilkan dalam tabel 4.5 :

Tabel 4.5

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.467140	4	0.0001

Sumber : Hasil pengolahan dari Eviews 9

Berdasarkan hasil *uji hausman* diatas menunjukkan bahwa nilai Statistic Chi-sq sebesar 23.467140 dengan nilai probabilitas $0.0001 < 0.05$ (α 5%) yang artinya menolak H_0 dan menerima H_a . Kesimpulan dari *uji hausman* menunjukkan bahwa *Fixed Effect Models* lebih baik dibandingkan dengan *Random Effect Models*.

4.4 Evaluasi Hasil

Model dari hasil regresi terbaik adalah *Fixed Effect Model*. Hasilnya ditampilkan dalam dalam tabel 4.6 :

Tabel 4.6

Hasil Estimasi Fixed Effect

Dependent Variable: LOGPDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/08/18 Time: 22:50
 Sample: 2013 2017
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.97085	0.675647	17.71760	0.0000
LOGPAD	0.082280	0.015464	5.320618	0.0000
LOGDAK	0.048719	0.005873	8.295566	0.0000
LOGDBH_PAJAK_NON_PAJAK	-0.024635	0.016439	-1.498554	0.1363
LOGBELANJA_DAERAH	0.067766	0.025432	2.664617	0.0086
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.998410	Mean dependent var	16.67083	
Adjusted R-squared	0.997965	S.D. dependent var	0.671548	
S.E. of regression	0.030291	Akaike info criterion	-3.962361	
Sum squared resid	0.124785	Schwarz criterion	-3.257066	
Log likelihood	385.7066	Hannan-Quinn criter.	-3.676273	
F-statistic	2247.018	Durbin-Watson stat	1.820572	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil pengolahan dari Eviews 9

Berdasarkan hasil regresi Fixed Effect dapat dituliskan persamaan model regresinya sebagai berikut:

$$\text{LogY} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log X1} + \beta_2 \text{LogX2} + \beta_3 \text{LogX3} + \beta_4 \text{LogX4} + \mu$$

$$Y = 11.97085 + 0.082280 X1 + 0.048719 X2 - 0.024635 X3 + 0.067766 X4$$

Keterangan :

Y : PDRB (Juta Rupiah)

X1 : PAD (Ribuan Rupiah)

X2 : DAK (Ribuan Rupiah)

X3 : DBH (Ribuan Rupiah)

X4 : Belanja Daerah (Ribuan Rupiah)

4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2) / R-squared

Nilai koefisien determinasi atau R^2 adalah sebesar 0.998410 atau 99 persen. Artinya bahwa variabel dependent PDRB dapat dijelaskan oleh variabel independent PAD, DAK, DBH Pajak/Non Pajak, dan Belanja Daerah sebesar 99 persen dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

4.4.2 Uji F-Statistic (Uji variabel secara bersama-sama)

Nilai F-Statistic pada tabel diperoleh sebesar 2247.018 dengan nilai probabilitas $0.000000 < 0.05$ (α 5%). Sehingga dapat disimpulkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) pajak/non pajak, dan belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

4.4.3 Uji t-statistic

Nilai t-statistic dilihat dari nilai probabilitas (*p-value*) dengan tingkat signifikansi 0.05 (α 5%).

Tabel 4.7

Hasil Estimasi Pengujian Hipotesis

Variabel	Probabilitas	Keterangan
PAD	0.0000	Signifikan
DAK	0.0000	Signifikan
DBH	0.1363	Tidak Signifikan
Belanja Daerah	0.0086	Signifikan

Sumber : Hasil pengolahan dari Eviews 9

Hasil uji t pada tabel *fixed effect model* diatas sebagai berikut:

a. Uji t-statistic variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Nilai t-statistic variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tabel *fixed effect* adalah 5.320618 dengan nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$ (α 5%). Artinya variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

b. Uji t-statistic variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

Nilai t-statistic variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tabel *fixed effect* adalah 8.295566 dengan nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$ (α 5%). Artinya variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

c. Uji t-statistic variabel Dana Bagi Hasil (DBH) pajak/non pajak

Nilai t-statistic variabel Dana Bagi Hasil (DBH) pajak/non pajak pada tabel *fixed effect* adalah -1.498554 dengan nilai probabilitas $0.1363 > 0.05$ (α 5%). Artinya variabel DBH pajak/non pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

d. Uji t-statistic variabel Belanja Daerah

Nilai t-statistic variabel Belanja Daerah pada tabel *fixed effect* adalah 2.664617 dengan nilai probabilitas $0.00863 < 0.05$ (α 5%). Artinya variabel Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

4.5 Analisis Hasil dan Pembahasan Ekonomi

4.5.1 Persamaan Estimasi dengan Intersept

Analisis intersept diperoleh dari penjumlahan konstanta hasil estimasi dan hasil estimasi dari koefisien antar Kabupaten/Kota.

Tabel 4.8**Analisis Intersept**

Kota/Kabupaten	Konstanta	Koefisien	Intersept
KAB. SEMARANG	1.821771	11.97085	13.792621
KAB. CILACAP	1.528917	11.97085	13.499767
KAB. KUDUS	1.357326	11.97085	13.328176
KOTA SURAKARTA	0.508336	11.97085	12.479186
KAB. BANYUMAS	0.490125	11.97085	12.460975
KAB. BREBES	0.371988	11.97085	12.342838
KAB. KLATEN	0.253576	11.97085	12.224426
KAB. SUKOHARJO	0.188694	11.97085	12.159544
KAB. KARANGANYAR	0.183348	11.97085	12.154198
KAB. SRAGEN	0.171294	11.97085	12.142144
KAB. TEGAL	0.113028	11.97085	12.083878
KAB. BOYOLALI	0.023185	11.97085	11.994035
KAB. JEPARA	-0.014843	11.97085	11.956007
KAB. GROBOGAN	-0.119745	11.97085	11.851105
KAB. KEBUMEN	-0.132822	11.97085	11.838028
KAB. DEMAK	-0.159155	11.97085	11.811695
KAB. BLORA	-0.183668	11.97085	11.787182
KAB. PEMALANG	-0.186005	11.97085	11.784845
KAB. PURBALINGGA	-0.200462	11.97085	11.770388
KAB. BATANG	-0.297369	11.97085	11.673481
KAB. BANJARNEGARA	-0.340666	11.97085	11.630184
KAB. WONOSOBO	-0.387391	11.97085	11.583459

KAB. REMBANG	-0.437872	11.97085	11.532978
KAB. PURWOREJO	-0.495373	11.97085	11.475477
KOTA TEGAL	-0.609588	11.97085	11.361262
KOTA SALATIGA	-0.682376	11.97085	11.288474
KAB. PEKALONGAN	-1.068319	11.97085	10.902531
KOTA MAGELANG	-1.081751	11.97085	10.889099
KAB. MAGELANG	-1.192295	11.97085	10.778555
KAB. KENDAL	0.37599	11.97085	12.34684
KOTA SEMARANG	0.37249	11.97085	12.34334
KAB. PATI	0.3077	11.97085	12.27855
KOTA PEKALONGAN	-0.15914	11.97085	11.81171
KAB. TEMANGGUNG	-0.28618	11.97085	11.68467
KAB. WONOGIRI	-0.03275	11.97085	11.9381

k

Berdasarkan hasil analisis intersept diatas maka tingkat PDRB tertinggi pada Kabupaten Semarang sebesar 13.792621. Hal ini dikarenakan Kabupaten Semarang memiliki sektor industri yang menjadi sektor andalan bagi perekonomian Kabupaten Semarang sehingga menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah . Sedangkan tingkat PDRB terendah yaitu Kabupaten Wonogiri sebesar 11.9381. Sektor pertanian menjadi sektor unggulan di Kabupaten Wonogiri, sementara sektor lainnya seperti sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor informasi dan komunikasi Kabupaten Wonogiri tidak memiliki spesialisasi di sektor tersebut. Sedangkan sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang berpotensi untuk diunggulkan dalam peningkatan perekonomian.

4.5.2 Analisis Ekonomi :

4.5.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB

Hasil dari regresi menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki koefisien sebesar 0.082280 dan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat α 5% terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Artinya ketika terjadi kenaikan 1 persen PAD maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0.082280 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Suatu daerah yang dapat menggali potensi dan mengoptimalkan potensi daerahnya cenderung akan meningkatkan PAD sehingga dapat meningkatkan PDRB.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jaya dan Sabilla (2014) bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan Putri (2015) pada studi kasus di Provinsi Jawa Tengah bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan maka akan meningkatkan PAD sehingga berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. PAD berfungsi untuk membiayai membiayai infrastruktur serta sarana dan prasarana. Semakin baik fasilitas sarana dan prasarana maka akan berpengaruh terhadap PDRB.

4.5.2.2 Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap PDRB

Hasil dari regresi menunjukkan bahwa variabel DAK memiliki koefisien sebesar 0.048719 dan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat α 5% terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan ketika terjadi kenaikan 1 persen DAK maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0.048719 persen. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adi, dkk (2016) pada studi kasus di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. DAK dipergunakan untuk mendanai sarana dan prasarana serta pelayanan untuk masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Apabila suatu daerah memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang baik maka akan mempengaruhi besarnya DAK yang nantinya dapat mendorong PDRB.

4.5.2.3 Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap PDRB

Hasil dari regresi menunjukkan bahwa variabel DBH memiliki koefisien sebesar -0.024635 dan berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada tingkat α 5% terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap PDRB. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Azis, 2016) bahwa DBH tidak signifikan terhadap PDRB karena kurang adanya

kontribusi secara maksimal dalam hal pengalokasian pembangunan fasilitas sarana publik.

4.5.2.4 Belanja Daerah terhadap PDRB

Hasil dari regresi menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah memiliki koefisien sebesar 0.067766 dan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat α 5% terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan ketika terjadi kenaikan 1 persen belanja daerah maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0.067766 persen. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rasdalima, dkk (2017) pada studi kasus di Provinsi Sukawesi Utara yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung, apabila belanja langsung digunakan sesuai dengan fungsinya yang bertujuan dalam pembangunan daerah maka semakin besar belanja pembangunan suatu daerah sehingga pembangunan di daerah tersebut akan meningkat. Dalam hal ini semakin besar belanja daerah maka berdampak terhadap perekonomian daerah yang semakin besar pula.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal yang terdiri dari beberapa variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Daerah (BD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Uji F-Statistik dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena nilai PAD yang meningkat setiap tahun berdampak pada besarnya PDRB. PAD merupakan salah satu wujud dari desentralisasi dari sisi penerimaan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu provinsi.

3. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena suatu daerah memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang baik sehingga dapat mengundang investor untuk berinvestasi sehingga besarnya DAK dapat mendorong peningkatan PDRB.
4. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena kurang adanya kontribusi secara maksimal dalam hal pengalokasian pembangunan fasilitas sarana publik sehingga apabila DBH turun maka PDRB juga ikut turun.
5. Variabel Belanja Daerah (BD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena apabila belanja daerah digunakan sesuai dengan fungsinya yang bertujuan dalam pembangunan daerah maka semakin besar belanja pembangunan suatu daerah sehingga pembangunan di daerah tersebut akan meningkat. Selain itu, belanja daerah digunakan untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana publik dapat menarik penanam modal untuk berinvestasi di daerah tersebut. Jika investasi meningkat maka PDRB juga akan meningkat.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka ada beberapa implikasi yang diperoleh yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, PAD merupakan salah satu wujud desentralisasi dari sisi penerimaan melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Apabila PAD meningkat maka akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menggali potensi yang dimiliki suatu daerah dan mengoptimalkan sumber daya yang ada agar dapat memberikan pemasukan keuangan daerah serta pemerintah juga perlu memeriksa kembali sektor unggulan apa saja yang dimiliki daerah yang perlu ditingkatkan alokasi dananya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
2. Dana perimbangan merupakan dana yang dialokasikan untuk daerah dalam membiayai kebutuhan daerah yang memiliki peran dalam mendorong pembangunan antar daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan mendanai kegiatan khusus urusan

daerah. DAK diharapkan perlu terus ditingkatkan terutama pada daerah yang masih memiliki kemampuan keuangan yang masih rendah untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana prioritas nasional seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dana Bagi Hasil (DBH) meliputi penerimaan pajak dan penerimaan sumber daya alam yang dibagikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah. Suatu daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah akan mendapatkan DBH yang tinggi, sedangkan daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah akan menerima DBH yang rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan atau mengkaji ulang dana yang akan dialokasikan kepada daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah agar daerah tersebut juga dapat mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki.

3. Belanja Daerah (BD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan belanja daerah secara proporsional antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung karena tujuan belanja daerah adalah menunjang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah harus lebih mengutamakan belanja daerah yang lebih memihak kepentingan publik agar dapat memberikan dampak positif terhadap PDRB.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. (2015). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal Interdisipliner Kritis UKSW*, (Mardiasmo 2002), 1–20.
- Anita, Prof. Dr. Said Mohammad, M. ., & Hamzah, P. D. A. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 21–29.
- Apriesa, L. F. (2013). Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus □: Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics*, 2, 1–12.
- Badan Pusat Statistik. (2018, September 17). Retrieved From Badan Pusat Statistik: www.bps.go.id
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018, September 17). Retrieved From www.djpk.kemenkeu.go.id
- Fahrurriza, dkk. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan Di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, IX(3), 198–224.

- Ferddy, dkk. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonom*, 17(3), 125–137.
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1–92.
- Panji, I. P. B., & Indrajaya, I. G. B. (2013). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Unud*, 5, 316–337.
- Pujiati, A. (2004). Ekonomi Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Semarang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (33), 61–70.
- Sabilla, K., & Jaya, I. K. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15(1), 316–337.
- Sasana, H. (2006). Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten / Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dinamika Pembangunan*, Volume 3 N, 145–170.
- Saputra, B., & Mahmudi. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jaai*, 16(2), 185–199.
- Supriyadi, Armandelis, & Rahmadi, S. (2013). Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*,

I(1), 1–10.

Zulyanto, A. (2010). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonom*, 17(3), 1–122.

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soeradi. (2014). *Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonesia.



LAMPIRAN

Lampiran 1

**Data PDRB dan PAD Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah 2013-2017**

KABUPATEN/KOTA	TAHUN	PDRB	PAD
KAB. BANJARNEGARA	2013	110.430.830.123.509	98.975.318.350
KAB. BANJARNEGARA	2014	116.298.458.549.208	161.652.537.773
KAB. BANJARNEGARA	2015	122.660.463.473.867	180.561.068.549
KAB. BANJARNEGARA	2016	129.296.573.774.923	221.048.387.512
KAB. BANJARNEGARA	2017	136.303.854.436.926	297.485.382.003
KAB. BANYUMAS	2013	277.931.384.667.819	308.349.434.319
KAB. BANYUMAS	2014	2.936.768.740.114	435.597.688.642
KAB. BANYUMAS	2015	311.648.763.980.903	502.281.349.460
KAB. BANYUMAS	2016	3.305.104.665.306	541.418.386.912
KAB. BANYUMAS	2017	351.473.133.027.522	619.631.163.930
KAB. BATANG	2013	111.046.967.818.748	143.502.571.339
KAB. BATANG	2014	116.938.970.590.135	172.638.212.952
KAB. BATANG	2015	123.282.392.319.986	179.721.273.968
KAB. BATANG	2016	129.426.910.936.943	209.957.559.449
KAB. BATANG	2017	136.272.798.061.107	112.383.412.989
KAB. BLORA	2013	11.712.504.853.908	95.192.786.972
KAB. BLORA	2014	122.272.012.868.149	144.724.169.929
KAB. BLORA	2015	128.825.877.003.051	156.402.924.037
KAB. BLORA	2016	159.134.320.326.258	171.277.522.706
KAB. BLORA	2017	168.433.605.384.823	280.042.019.102
KAB. BOYOLALI	2013	162.664.986.782.465	160.752.449.651
KAB. BOYOLALI	2014	17.148.350.757.305	227.516.495.964
KAB. BOYOLALI	2015	18.170.383.946.078	260.633.637.928
KAB. BOYOLALI	2016	191.325.562.993.141	292.310.032.226
KAB. BOYOLALI	2017	201.886.997.085.513	387.966.331.446

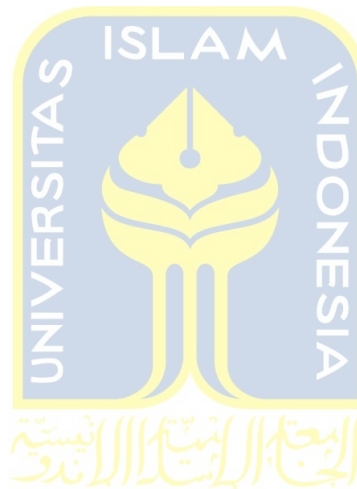
KAB. BREBES	2013	238.120.569.235.009	133.836.336.686
KAB. BREBES	2014	250.741.715.054.097	267.770.613.635
KAB. BREBES	2015	265.728.348.924.748	301.953.709.818
KAB. BREBES	2016	279.219.863.263.711	339.156.063.168
KAB. BREBES	2017	294.502.288.064.158	167.922.673.669
KAB. CILACAP	2013	810.226.702.606.326	278.507.545.940
KAB. CILACAP	2014	833.915.001.768.059	374.023.664.013
KAB. CILACAP	2015	883.576.066.823.262	409.845.660.919
KAB. CILACAP	2016	928.303.621.995.757	428.598.349.897
KAB. CILACAP	2017	951.038.466.904.394	645.815.098.213
KAB. DEMAK	2013	134.992.264.734.929	138.214.446.133
KAB. DEMAK	2014	140.784.197.959.949	220.329.949.471
KAB. DEMAK	2015	149.129.995.962.005	254.324.487.512
KAB. DEMAK	2016	156.663.475.612.785	287.457.500.571
KAB. DEMAK	2017	165.375.792.086.615	309.612.407.201
KAB. GROBOGAN	2013	144.747.289.295.447	143.586.365.567
KAB. GROBOGAN	2014	150.644.566.588.027	235.295.346.622
KAB. GROBOGAN	2015	159.626.194.251.283	272.718.439.175
KAB. GROBOGAN	2016	166.746.296.965.843	299.211.316.168
KAB. GROBOGAN	2017	176.172.542.665.116	440.456.238.668
KAB. JEPARA	2013	156.237.388.721.254	133.778.055.195
KAB. JEPARA	2014	163.747.152.144.969	231.673.059.919
KAB. JEPARA	2015	172.103.659.178.293	270.251.582.727
KAB. JEPARA	2016	180.741.348.810.317	322.509.753.285
KAB. JEPARA	2017	190.010.408.255.374	210.557.155.420
KAB. KARANGANYAR	2013	192.565.162.766.839	161.715.929.349
KAB. KARANGANYAR	2014	202.624.444.230.378	215.298.860.199
KAB. KARANGANYAR	2015	212.862.871.361.038	255.445.549.750
KAB. KARANGANYAR	2016	224.287.938.002.697	301.307.800.956
KAB. KARANGANYAR	2017	236.659.520.453.559	415.142.563.370
KAB. KEBUMEN	2013	143.333.334.960.691	131.481.736.502
KAB. KEBUMEN	2014	151.630.918.442.881	242.079.502.075
KAB. KEBUMEN	2015	161.155.540.119.692	245.159.255.421

KAB. KEBUMEN	2016	169.162.195.582.225	291.016.321.703
KAB. KEBUMEN	2017	177.439.151.528.767	443.608.862.461
KAB. KENDAL	2013	223.861.235.048.107	136.029.702.522
KAB. KENDAL	2014	235.368.343.912.236	215.294.086.780
KAB. KENDAL	2015	247.623.253.629.439	239.564.403.981
KAB. KENDAL	2016	2.613.113.706.834	265.074.406.548
KAB. KENDAL	2017	275.860.971.115.766	404.978.613.972
KAB. KLATEN	2013	20.241.429.005.521	115.441.420.053
KAB. KLATEN	2014	21.424.522.363.051	177.922.415.860
KAB. KLATEN	2015	225.589.761.507.076	190.622.670.128
KAB. KLATEN	2016	237.179.310.160.757	224.197.408.481
KAB. KLATEN	2017	249.203.028.637.259	370.822.821.113
KAB. KUDUS	2013	599.445.565.194.234	144.995.092.035
KAB. KUDUS	2014	626.006.808.730.221	234.073.380.352
KAB. KUDUS	2015	650.299.375.008.328	255.284.092.548
KAB. KUDUS	2016	666.690.853.963.095	279.239.106.717
KAB. KUDUS	2017	68.649.053.550.924	366.031.203.778
KAB. MAGELANG	2013	475.509.220.305.285	173.253.651.914
KAB. MAGELANG	2014	499.211.282.201.178	242.448.677.267
KAB. MAGELANG	2015	52.473.412.670.132	261.569.091.783
KAB. MAGELANG	2016	551.868.453.142.803	288.485.678.128
KAB. MAGELANG	2017	580.431.199.710.898	400.229.216.482
KAB. PATI	2013	223.296.939.790.152	169.127.415.979
KAB. PATI	2014	233.652.139.897.012	279.254.884.135
KAB. PATI	2015	247.703.250.726.074	310.063.640.827
KAB. PATI	2016	261.219.553.368.107	314.921.084.791
KAB. PATI	2017	275.321.681.030.235	449.821.345.800
KAB. PEKALONGAN	2013	545.619.687.952.889	147.687.255.201
KAB. PEKALONGAN	2014	575.528.226.494.044	255.037.017.191
KAB. PEKALONGAN	2015	604.309.572.528.814	251.558.970.834
KAB. PEKALONGAN	2016	636.727.296.390.083	310.572.581.552
KAB. PEKALONGAN	2017	670.627.870.330.008	305.394.299.061
KAB. PEMALANG	2013	131.720.636.092.224	136.362.281.618
KAB. PEMALANG	2014	138.986.694.232.728	217.345.439.974
KAB. PEMALANG	2015	14.673.696.230.437	230.435.212.865
KAB. PEMALANG	2016	15.463.800.552.329	275.458.054.016

KAB. PEMALANG	2017	16.297.654.010.298	419.126.517.641
KAB. PURBALINGGA	2013	12.778.311.232.236	122.858.738.938
KAB. PURBALINGGA	2014	133.977.127.805.117	202.593.689.614
KAB. PURBALINGGA	2015	141.306.122.623.418	215.622.047.787
KAB. PURBALINGGA	2016	148.065.496.285.869	251.816.668.602
KAB. PURBALINGGA	2017	155.642.844.325.209	355.859.003.583
KAB. PURWOREJO	2013	987.096.995.239.856	127.565.801.410
KAB. PURWOREJO	2014	103.129.377.922.923	200.258.601.329
KAB. PURWOREJO	2015	108.626.459.768.895	233.934.134.286
KAB. PURWOREJO	2016	114.183.552.158.496	255.599.240.424
KAB. PURWOREJO	2017	120.050.953.936.397	597.212.989.306
KAB. REMBANG	2013	97.807.503.931.426	126.808.083.812
KAB. REMBANG	2014	102.842.743.566.997	165.530.925.487
KAB. REMBANG	2015	108.502.691.985.737	193.122.759.857
KAB. REMBANG	2016	114.180.087.326.394	234.168.365.751
KAB. REMBANG	2017	121.234.688.425.201	300.319.284.807
KAB. SEMARANG	2013	969.854.020.417.564	215.679.554.472
KAB. SEMARANG	2014	10.310.987.490.611	248.213.019.938
KAB. SEMARANG	2015	109.110.689.605.471	278.851.900.617
KAB. SEMARANG	2016	115.485.429.483.943	318.536.051.176
KAB. SEMARANG	2017	122.000.440.382.962	417.417.848.831
KAB. SRAGEN	2013	191.021.817.353.588	146.721.552.108
KAB. SRAGEN	2014	201.698.247.859.388	254.392.449.817
KAB. SRAGEN	2015	213.908.711.966.603	267.711.820.479
KAB. SRAGEN	2016	226.183.216.576.194	297.176.332.577
KAB. SRAGEN	2017	239.332.521.747.518	404.569.404.722
KAB. SUKOHARJO	2013	194.018.894.397.832	192.971.720.442
KAB. SUKOHARJO	2014	204.490.098.415.207	264.814.413.083
KAB. SUKOHARJO	2015	21.612.078.191.865	313.947.492.011
KAB. SUKOHARJO	2016	228.459.828.138.297	363.163.428.162
KAB. SUKOHARJO	2017	241.529.394.786.725	464.567.409.857
KAB. TEGAL	2013	180.502.919.687.638	156.244.859.788
KAB. TEGAL	2014	189.588.410.399.476	253.716.602.369
KAB. TEGAL	2015	199.994.754.549.728	304.000.970.135
KAB. TEGAL	2016	2.118.291.723.202	316.051.189.734
KAB. TEGAL	2017	223.221.001.261.301	375.531.165.351

KAB. TEMANGGUNG	2013	112.993.429.681.472	102.080.197.094
KAB. TEMANGGUNG	2014	118.676.795.947.719	160.726.943.432
KAB. TEMANGGUNG	2015	124.893.945.393.914	212.498.139.929
KAB. TEMANGGUNG	2016	13.110.745.635.877	281.328.148.970
KAB. TEMANGGUNG	2017	13.724.464.805.417	308.470.658.340
KAB. WONOGIRI	2013	153.032.804.702.043	111.592.606.315
KAB. WONOGIRI	2014	161.077.951.653.969	182.149.063.108
KAB. WONOGIRI	2015	169.771.985.619.655	211.208.601.200
KAB. WONOGIRI	2016	178.653.454.210.072	218.604.854.595
KAB. WONOGIRI	2017	187.883.977.646.094	333.840.434.905
KAB. WONOSOBO	2013	103.337.570.508.005	108.729.508.524
KAB. WONOSOBO	2014	108.281.686.814.873	175.319.364.867
KAB. WONOSOBO	2015	113.340.800.367.725	182.607.628.797
KAB. WONOSOBO	2016	119.159.989.182.838	199.894.767.510
KAB. WONOSOBO	2017	122.928.048.429.833	228.017.473.938
KOTA MAGELANG	2013	475.509.220.305.285	107.739.838.961
KOTA MAGELANG	2014	499.211.282.201.178	164.927.631.230
KOTA MAGELANG	2015	52.473.412.670.132	186.677.410.081
KOTA MAGELANG	2016	551.868.453.142.803	220.315.848.702
KOTA MAGELANG	2017	580.431.199.710.898	233.557.714.356
KOTA PEKALONGAN	2013	120.348.058.934.773	114.252.438.719
KOTA PEKALONGAN	2014	126.303.688.205.428	144.065.424.017
KOTA PEKALONGAN	2015	132.345.640.407.936	152.044.596.332
KOTA PEKALONGAN	2016	1.391.770.182.964	178.604.460.870
KOTA PEKALONGAN	2017	146.521.787.074.087	192.002.871.181
KOTA SALATIGA	2013	698.904.549.925.832	106.100.450.499
KOTA SALATIGA	2014	73.780.428.161.136	165.747.645.080
KOTA SALATIGA	2015	775.918.161.800.962	167.010.555.173
KOTA SALATIGA	2016	816.394.075.738.572	203.768.652.017
KOTA SALATIGA	2017	858.900.953.843.592	220.243.361.132
KOTA SEMARANG	2013	257.581.210.758.462	925.919.310.506
KOTA SEMARANG	2014	272.641.129.568.792	1.138.367.228.493
KOTA SEMARANG	2015	287.683.272.952.994	1.201.581.778.459
KOTA SEMARANG	2016	302.830.326.109.642	1.491.645.900.065
KOTA SEMARANG	2017	319.392.501.046.716	1.791.874.833.769
KOTA SURAKARTA	2013	256.316.813.156.037	298.400.846.632

KOTA SURAKARTA	2014	269.843.586.109.507	335.660.206.641
KOTA SURAKARTA	2015	284.534.938.665.345	372.798.426.790
KOTA SURAKARTA	2016	299.663.730.055.528	425.502.779.064
KOTA SURAKARTA	2017	31.562.980.463.378	527.544.224.971
KOTA TEGAL	2013	808.417.572.553.475	176.377.335.075
KOTA TEGAL	2014	849.132.536.576.408	241.936.166.929
KOTA TEGAL	2015	895.387.955.599.393	271.601.407.419
KOTA TEGAL	2016	944.053.097.445.749	287.343.889.954
KOTA TEGAL	2017	995.559.297.778.872	306.830.656.135



Data DAK, DBH, dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Provinsi Jawa Tengah 2013-2017

KABUPATEN/KOTA	TAHUN	DAK	DBH	BELANJA DAERAH
KAB. BANJARNEGARA	2013	69.482.630.000	46.788.081.639	1.175.474.028.855
KAB. BANJARNEGARA	2014	61.066.040.000	28.672.247.561	1.349.768.030.982
KAB. BANJARNEGARA	2015	133.441.500.000	27.425.449.207	1.612.219.383.363
KAB. BANJARNEGARA	2016	252.046.683.715	35.379.420.897	2.017.382.964.152
KAB. BANJARNEGARA	2017	369.247.999.000	36.420.493.000	2.501.636.782.335
KAB. BANYUMAS	2013	78.662.730.000	64.781.445.125	2.018.052.963.730
KAB. BANYUMAS	2014	82.519.140.000	51.305.275.338	2.285.326.471.224
KAB. BANYUMAS	2015	87.526.800.000	46.326.481.480	2.531.669.334.010
KAB. BANYUMAS	2016	412.853.809.576	57.703.885.214	2.902.853.581.862
KAB. BANYUMAS	2017	469.884.500.000	60.649.624.000	3.197.888.391.969
KAB. BATANG	2013	49.792.440.000	36.092.499.854	1.067.412.675.201
KAB. BATANG	2014	52.176.600.000	32.222.748.761	1.212.281.052.710
KAB. BATANG	2015	79.498.400.000	28.619.261.343	1.368.164.749.166
KAB. BATANG	2016	203.972.546.139	36.645.424.250	1.560.785.414.489
KAB. BATANG	2017	202.041.680.000	33.473.161.000	1.771.421.404.507
KAB. BLORA	2013	53.492.890.000	94.501.754.069	1.318.484.054.214
KAB. BLORA	2014	61.140.660.000	89.559.359.181	1.468.208.051.148
KAB. BLORA	2015	98.119.410.000	72.722.131.124	1.669.967.939.618
KAB. BLORA	2016	277.435.119.000	110.850.744.558	1.951.816.454.287
KAB. BLORA	2017	320.191.768.000	113.420.744.000	1.981.347.481.358
KAB. BOYOLALI	2013	59.233.500.000	37.681.928.865	1.421.830.961.424
KAB. BOYOLALI	2014	81.095.720.000	36.002.551.801	1.617.991.646.314
KAB. BOYOLALI	2015	88.962.940.000	35.288.695.915	1.832.767.460.541
KAB. BOYOLALI	2016	279.575.054.900	46.125.444.420	2.057.281.803.197
KAB. BOYOLALI	2017	321.760.688.000	45.606.961.000	2.148.428.355.037
KAB. BREBES	2013	82.628.900.000	66.654.043.909	1.661.296.196.697
KAB. BREBES	2014	97.975.310.000	52.809.044.863	1.967.168.957.601
KAB. BREBES	2015	361.801.358.000	34.592.771.800	2.392.376.921.588

KAB. BREBES	2016	505.227.952.000	45.826.698.841	2.946.269.402.281
KAB. BREBES	2017	406.374.218.000	40.263.233.000	2.824.689.821.673
KAB. CILACAP	2013	108.157.350.000	79.297.931.881	2.047.162.545.621
KAB. CILACAP	2014	110.203.960.000	66.480.735.255	2.205.741.809.208
KAB. CILACAP	2015	173.385.700.000	57.045.195.187	2.657.124.478.070
KAB. CILACAP	2016	483.813.446.054	72.636.973.831	3.150.325.840.872
KAB. CILACAP	2017	445.585.680.000	76.372.132.000	3.003.052.618.755
KAB. DEMAK	2013	76.556.190.000	61.590.836.458	1.338.417.925.609
KAB. DEMAK	2014	74.599.670.000	51.123.044.748	1.560.956.571.429
KAB. DEMAK	2015	100.060.600.000	42.836.070.922	1.791.583.338.768
KAB. DEMAK	2016	306.941.212.573	51.315.790.629	2.065.356.315.666
KAB. DEMAK	2017	274.313.457.000	48.681.693.000	1.986.479.116.398
KAB. GROBOGAN	2013	104.304.440.000	63.924.773.793	1.507.949.202.417
KAB. GROBOGAN	2014	85.838.690.000	67.231.012.336	1.645.804.824.542
KAB. GROBOGAN	2015	131.245.950.000	46.067.092.310	1.979.187.272.646
KAB. GROBOGAN	2016	322.988.008.150	56.510.215.649	2.331.272.039.305
KAB. GROBOGAN	2017	376.668.275.000	43.796.097.000	2.553.147.904.253
KAB. JEPARA	2013	67.487.370.000	56.976.579.033	1.351.530.902.258
KAB. JEPARA	2014	81.294.110.000	43.097.774.239	1.505.224.190.536
KAB. JEPARA	2015	136.519.050.000	32.960.277.896	1.856.335.588.279
KAB. JEPARA	2016	339.310.214.684	43.932.231.816	2.157.976.237.985
KAB. JEPARA	2017	319.115.723.000	44.259.349.000	1.254.335.231.328
KAB. KARANGANYAR	2013	55.203.060.000	35.287.879.585	1.287.163.763.904
KAB. KARANGANYAR	2014	57.238.710.000	28.588.768.444	1.609.306.822.016
KAB. KARANGANYAR	2015	98.090.620.000	27.243.362.616	1.775.944.203.663
KAB. KARANGANYAR	2016	352.752.915.080	41.236.369.287	2.086.307.677.600
KAB. KARANGANYAR	2017	347.562.015.000	39.361.055.000	2.066.494.748.105
KAB. KEBUMEN	2013	79.063.860.000	34.564.265.803	1.548.176.706.140
KAB. KEBUMEN	2014	80.709.170.000	27.498.627.950	1.906.501.957.288
KAB. KEBUMEN	2015	166.313.240.000	30.994.004.370	2.285.364.998.990
KAB. KEBUMEN	2016	480.415.539.065	43.287.944.721	2.707.059.847.131
KAB. KEBUMEN	2017	436.397.468.000	44.054.830.000	2.630.271.307.685
KAB. KENDAL	2013	41.931.490.000	80.021.146.469	1.270.620.865.836
KAB. KENDAL	2014	47.886.615.000	64.347.674.040	1.414.346.670.683

KAB. KENDAL	2015	58.360.304.000	53.310.294.245	1.692.494.766.232
KAB. KENDAL	2016	228.131.891.000	62.908.768.657	1.954.982.476.287
KAB. KENDAL	2017	281.494.617.000	61.380.122.000	2.091.829.069.982
KAB. KLATEN	2013	61.175.420.000	47.125.348.741	1.621.602.407.460
KAB. KLATEN	2014	66.576.420.000	41.463.345.033	1.884.326.293.738
KAB. KLATEN	2015	77.379.170.000	38.414.990.283	2.077.785.996.047
KAB. KLATEN	2016	318.994.589.110	50.275.933.273	2.282.330.771.499
KAB. KLATEN	2017	377.519.126.000	47.349.972.000	2.481.861.743.842
KAB. KUDUS	2013	52.208.880.000	182.896.969.776	1.155.490.615.349
KAB. KUDUS	2014	41.391.675.000	175.108.008.176	1.508.269.213.968
KAB. KUDUS	2015	61.238.184.000	187.347.767.258	1.706.848.430.748
KAB. KUDUS	2016	228.303.262.665	240.510.038.401	2.149.042.733.903
KAB. KUDUS	2017	235.573.389.000	237.561.343.000	2.006.998.142.946
KAB. MAGELANG	2013	43.096.223.000	43.990.943.111	1.258.155.351.177
KAB. MAGELANG	2014	48.736.118.000	33.580.069.157	1.655.060.222.422
KAB. MAGELANG	2015	50.907.384.000	33.120.454.660	1.744.730.814.566
KAB. MAGELANG	2016	83.510.170.410	50.834.584.009	2.073.797.409.332
KAB. MAGELANG	2017	324.759.491.000	49.652.944.000	2.451.441.154.742
KAB. PATI	2013	72.903.370.000	61.481.767.993	1.653.021.493.161
KAB. PATI	2014	79.852.630.000	40.580.008.710	1.862.733.252.569
KAB. PATI	2015	92.717.380.000	35.611.941.666	2.136.260.318.715
KAB. PATI	2016	327.576.149.212	44.349.751.185	2.583.065.999.166
KAB. PATI	2017	436.199.534.000	41.948.713.000	2.647.104.847.971
KAB. PEKALONGAN	2013	60.587.590.000	27.389.237.030	1.267.308.408.350
KAB. PEKALONGAN	2014	60.380.950.000	28.705.392.098	1.395.905.892.563
KAB. PEKALONGAN	2015	89.642.610.000	26.500.021.307	1.606.482.574.206
KAB. PEKALONGAN	2016	222.507.471.000	33.291.841.011	1.804.967.596.944
KAB. PEKALONGAN	2017	334.863.217.000	34.482.421.000	2.405.690.679.295
KAB. PEMALANG	2013	63.504.568.000	34.270.008.058	1.477.106.031.341
KAB. PEMALANG	2014	54.018.555.000	29.567.028.758	1.615.850.550.570
KAB. PEMALANG	2015	110.616.990.000	31.418.194.717	1.958.568.738.065
KAB. PEMALANG	2016	270.426.675.208	39.469.913.885	1.847.304.444.796
KAB. PEMALANG	2017	271.379.918.000	31.636.180.000	2.251.440.410.196
PURBALINGGA	2013	66.641.060.000	44.743.100.496	1.126.557.032.701
KAB. PURBALINGGA	2014	57.267.330.000	33.120.213.877	1.271.839.631.902
KAB.	2015	72.251.830.000	23.891.824.755	1.466.143.221.728

PURBALINGGA				
KAB. PURBALINGGA	2016	242.375.709.820	36.099.689.040	1.813.162.137.468
KAB. PURBALINGGA	2017	296.308.962.000	33.247.367.000	2.013.766.011.409
KAB. PURWOREJO	2013	53.323.020.000	33.506.087.903	1.204.862.645.824
KAB. PURWOREJO	2014	57.024.620.000	26.253.270.581	1.445.588.965.548
KAB. PURWOREJO	2015	85.821.190.000	25.192.547.903	1.783.917.689.792
KAB. PURWOREJO	2016	339.417.614.546	35.510.298.310	1.968.159.503.754
KAB. PURWOREJO	2017	266.743.460.000	34.788.977.000	5.494.865.193.278
KAB. REMBANG	2013	42.098.910.000	34.411.514.793	1.060.648.437.288
KAB. REMBANG	2014	46.206.000.000	28.882.462.184	1.275.908.646.560
KAB. REMBANG	2015	98.419.408.000	31.211.494.235	1.211.257.900.368
KAB. REMBANG	2016	107.558.652.000	43.004.058.312	1.734.304.081.929
KAB. REMBANG	2017	195.353.541.000	16.591.751.000	2.194.257.086.098
KAB. SEMARANG	2013	59.113.470.000	41.391.323.026	1.333.537.783.262
KAB. SEMARANG	2014	67.407.340.000	39.852.319.272	1.505.315.320.115
KAB. SEMARANG	2015	40.654.310.000	34.923.732.517	1.669.408.310.158
KAB. SEMARANG	2016	310.780.221.524	46.151.509.596	1.974.199.071.109
KAB. SEMARANG	2017	303.081.384.000	50.919.658.000	2.034.326.528.672
KAB. SRAGEN	2013	61.857.560.000	43.766.773.909	1.408.595.385.453
KAB. SRAGEN	2014	76.469.300.000	28.213.906.538	1.697.047.243.371
KAB. SRAGEN	2015	149.737.340.000	26.875.051.941	2.034.911.833.327
KAB. SRAGEN	2016	333.935.980.704	40.870.465.967	2.115.629.412.523
KAB. SRAGEN	2017	322.608.210.000	38.001.261.000	2.600.943.623.800
KAB. SUKOHARJO	2013	53.124.680.000	27.938.065.286	1.281.648.110.545
KAB. SUKOHARJO	2014	56.904.480.000	23.475.992.411	1.526.637.448.160
KAB. SUKOHARJO	2015	68.771.690.000	21.411.266.926	1.635.302.267.018
KAB. SUKOHARJO	2016	287.044.558.458	30.990.667.000	1.879.860.885.343
KAB. SUKOHARJO	2017	293.705.109.000	28.952.226.000	1.887.503.285.006
KAB. TEGAL	2013	72.524.910.000	41.743.816.550	1.531.862.423.082
KAB. TEGAL	2014	63.646.823.000	34.564.802.437	1.714.883.146.223
KAB. TEGAL	2015	68.489.256.000	32.554.722.696	1.934.297.115.658
KAB. TEGAL	2016	290.589.280.983	40.792.559.417	2.422.128.524.079
KAB. TEGAL	2017	360.720.112.000	43.113.186.000	2.453.004.538.262
KAB. TEMANGGUNG	2013	41.627.621.000	50.228.458.791	1.000.841.225.195
KAB. TEMANGGUNG	2014	56.702.810.000	43.511.964.761	1.170.880.302.872

KAB. TEMANGGUNG	2015	72.728.590.000	45.507.112.934	1.505.003.745.055
KAB. TEMANGGUNG	2016	106.004.730.000	55.551.255.813	1.739.541.988.789
KAB. TEMANGGUNG	2017	228.129.620.000	55.919.501.000	1.768.574.354.911
KAB. WONOGIRI	2013	75.705.890.000	46.180.230.425	1.449.245.447.657
KAB. WONOGIRI	2014	59.392.120.000	27.868.669.342	1.652.579.863.799
KAB. WONOGIRI	2015	86.117.520.000	28.589.690.063	1.877.830.219.839
KAB. WONOGIRI	2016	289.121.067.975	35.612.991.283	2.132.909.652.036
KAB. WONOGIRI	2017	373.869.744.000	36.331.740.000	2.893.668.983.035
KAB. WONOSOBO	2013	57.950.180.000	34.640.804.684	988.103.772.409
KAB. WONOSOBO	2014	59.423.010.000	40.988.318.009	1.220.323.640.367
KAB. WONOSOBO	2015	56.541.744.000	31.393.027.154	1.494.447.291.802
KAB. WONOSOBO	2016	198.974.002.000	38.789.323.015	1.619.140.120.460
KAB. WONOSOBO	2017	261.082.421.000	39.023.034.000	1.715.290.159.198
KOTA MAGELANG	2013	20.644.487.000	24.609.560.290	630.850.717.357
KOTA MAGELANG	2014	22.365.783.000	20.207.973.171	682.223.870.407
KOTA MAGELANG	2015	25.774.760.000	18.772.034.465	736.340.437.750
KOTA MAGELANG	2016	89.394.073.463	30.333.059.082	871.859.130.603
KOTA MAGELANG	2017	103.118.602.000	30.795.103.000	879.968.883.747
KOTA PEKALONGAN	2013	34.721.100.000	31.009.410.779	664.175.351.720
KOTA PEKALONGAN	2014	34.173.710.000	28.224.678.764	736.794.861.264
KOTA PEKALONGAN	2015	45.408.120.000	24.493.648.665	792.543.896.689
KOTA PEKALONGAN	2016	109.412.669.154	32.123.238.676	869.324.083.854
KOTA PEKALONGAN	2017	104.826.592.000	34.382.909.000	924.871.599.082
KOTA SALATIGA	2013	16.958.760.000	28.573.341.133	529.237.634.485
KOTA SALATIGA	2014	24.042.788.000	26.626.367.951	645.787.982.695
KOTA SALATIGA	2015	33.981.288.000	21.824.580.940	673.865.039.498
KOTA SALATIGA	2016	83.698.193.202	30.072.083.681	919.667.517.133
KOTA SALATIGA	2017	115.279.313.000	31.374.482.000	849.474.262.275
KOTA SEMARANG	2013	14.993.022.000	122.101.932.757	2.473.490.609.437
KOTA SEMARANG	2014	29.236.965.000	140.790.952.279	2.957.182.889.078
KOTA SEMARANG	2015	46.661.150.000	96.862.487.674	3.200.860.096.133
KOTA SEMARANG	2016	246.886.746.970	185.682.778.746	3.931.802.540.351

KOTA SEMARANG	2017	311.019.171.000	214.428.527.000	4.329.417.777.872
KOTA SURAKARTA	2013	32.893.036.000	57.526.347.441	1.375.304.857.300
KOTA SURAKARTA	2014	43.848.110.000	42.642.973.689	1.479.827.902.467
KOTA SURAKARTA	2015	3.750.100.000	38.677.463.465	1.532.527.097.064
KOTA SURAKARTA	2016	196.726.445.000	65.599.599.264	1.680.456.921.161
KOTA SURAKARTA	2017	186.707.540.000	76.679.735.000	1.768.345.963.065
KOTA TEGAL	2013	30.039.185.000	29.817.134.526	673.040.144.370
KOTA TEGAL	2014	22.933.763.000	23.777.788.261	783.099.149.188
KOTA TEGAL	2015	74.377.832.000	20.641.047.265	959.420.548.451
KOTA TEGAL	2016	165.828.134.725	31.599.100.468	1.074.739.578.886
KOTA TEGAL	2017	169.140.367.000	36.699.467.000	1.017.223.991.908

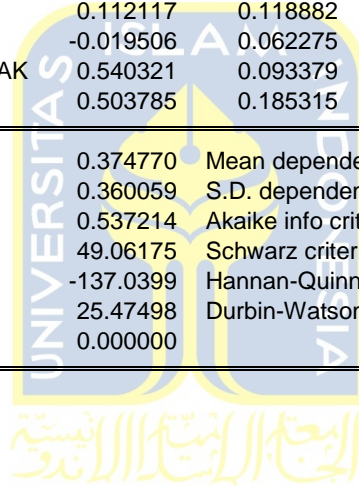


Lampiran 2

Hasil Common Effect

Dependent Variable: LOGPDRB
Method: Panel Least Squares
Date: 12/08/18 Time: 22:49
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-13.17860	3.234250	-4.074702	0.0001
LOGPAD	0.112117	0.118882	0.943098	0.3470
LOGDAK	-0.019506	0.062275	-0.313229	0.7545
LOGDBH_PAJAK_NON_PAJAK	0.540321	0.093379	5.786303	0.0000
LOGBELANJA_DAERAH	0.503785	0.185315	2.718537	0.0072
R-squared	0.374770	Mean dependent var		16.67083
Adjusted R-squared	0.360059	S.D. dependent var		0.671548
S.E. of regression	0.537214	Akaike info criterion		1.623314
Sum squared resid	49.06175	Schwarz criterion		1.713736
Log likelihood	-137.0399	Hannan-Quinn criter.		1.659992
F-statistic	25.47498	Durbin-Watson stat		0.067907
Prob(F-statistic)	0.000000			



Lampiran 3

Hasil Fixed Effect

Dependent Variable: LOGPDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/08/18 Time: 22:50
 Sample: 2013 2017
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.97085	0.675647	17.71760	0.0000
LOGPAD	0.082280	0.015464	5.320618	0.0000
LOGDAK	0.048719	0.005873	8.295566	0.0000
LOGDBH_PAJAK_NON_PAJAK	-0.024635	0.016439	-1.498554	0.1363
LOGBELANJA_DAERAH	0.067766	0.025432	2.664617	0.0086
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.998410	Mean dependent var	16.67083	
Adjusted R-squared	0.997965	S.D. dependent var	0.671548	
S.E. of regression	0.030291	Akaike info criterion	-3.962361	
Sum squared resid	0.124785	Schwarz criterion	-3.257066	
Log likelihood	385.7066	Hannan-Quinn criter.	-3.676273	
F-statistic	2247.018	Durbin-Watson stat	1.820572	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 4

Hasil Random Effect

Dependent Variable: LOGPDRB
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 12/08/18 Time: 22:52
 Sample: 2013 2017
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 175
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.68452	0.677759	17.23993	0.0000
LOGPAD	0.083301	0.015433	5.397555	0.0000
LOGDAK	0.046870	0.005853	8.007230	0.0000
LOGDBH_PAJAK_NON_PAJAK	-0.018097	0.016358	-1.106270	0.2702
LOGBELANJA_DAERAH	0.072971	0.025370	2.876259	0.0045
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.516458	0.9966
Idiosyncratic random			0.030291	0.0034
Weighted Statistics				
R-squared	0.835545	Mean dependent var		0.437118
Adjusted R-squared	0.831675	S.D. dependent var		0.077943
S.E. of regression	0.031978	Sum squared resid		0.173842
F-statistic	215.9288	Durbin-Watson stat		1.298140
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.092352	Mean dependent var		16.67083
Sum squared resid	71.22308	Durbin-Watson stat		0.003169

Lampiran 5

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1568.686780	(34,136)	0.0000
Cross-section Chi-square	1045.493120	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: LOGPDRB
Method: Panel Least Squares
Date: 12/08/18 Time: 22:50
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-13.17860	3.234250	-4.074702	0.0001
LOGPAD	0.112117	0.118882	0.943098	0.3470
LOGDAK	-0.019506	0.062275	-0.313229	0.7545
LOGDBH_PAJAK_NON_PAJAK	0.540321	0.093379	5.786303	0.0000
LOGBELANJA_DAERAH	0.503785	0.185315	2.718537	0.0072
R-squared	0.374770	Mean dependent var		16.67083
Adjusted R-squared	0.360059	S.D. dependent var		0.671548
S.E. of regression	0.537214	Akaike info criterion		1.623314
Sum squared resid	49.06175	Schwarz criterion		1.713736
Log likelihood	-137.0399	Hannan-Quinn criter.		1.659992
F-statistic	25.47498	Durbin-Watson stat		0.067907
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 6

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.467140	4	0.0001

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOGPAD	0.082280	0.083301	0.000001	0.2987
LOGDAK	0.048719	0.046870	0.000000	0.0001
LOGDBH_PAJAK_NON_PAJAK	-0.024635	-0.018097	0.000003	0.0001
LOGBELANJA_DAERAH	0.067766	0.072971	0.000003	0.0033

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOGPDRB

Method: Panel Least Squares

Date: 12/08/18 Time: 22:52

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.97085	0.675647	17.71760	0.0000
LOGPAD	0.082280	0.015464	5.320618	0.0000
LOGDAK	0.048719	0.005873	8.295566	0.0000
LOGDBH_PAJAK_NON_PAJAK	-0.024635	0.016439	-1.498554	0.1363
LOGBELANJA_DAERAH	0.067766	0.025432	2.664617	0.0086

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.998410	Mean dependent var	16.67083
Adjusted R-squared	0.997965	S.D. dependent var	0.671548
S.E. of regression	0.030291	Akaike info criterion	-3.962361
Sum squared resid	0.124785	Schwarz criterion	-3.257066
Log likelihood	385.7066	Hannan-Quinn criter.	-3.676273
F-statistic	2247.018	Durbin-Watson stat	1.820572
Prob(F-statistic)	0.000000		

